

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan tahap baru dalam kehidupan individu dan membawa banyak perubahan dalam berbagai aspek, termasuk tanggung jawab dan peran dalam rumah tangga. Pernikahan adalah langkah awal dalam kehidupan rumah tangga yang mana diperlukan kesiapan dan komitmen dalam menjalin hubungan antara pasangan yang bertujuan untuk mencapai rumah tangga yang damai dan bahagia (Tarigan, 2022). Pasangan muda yang baru menikah biasanya menghadapi tantangan dalam membangun struktur kepemimpinan dalam keluarganya. Kepemimpinan dalam rumah tangga ini akan mencerminkan bagaimana pasangan mengelola komunikasi, pembagian peran dan pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2020, sebanyak 8,19% perempuan di Indonesia tercatat menjalani pernikahan pertama pada usia 7 hingga 15 tahun. Hasil dari survey tersebut membuktikan bahwa pernikahan dini masih banyak dilakukan di Indonesia. Faktor pendidikan, lingkungan sosial dan pekerjaan menjadi penentu dalam persoalan perkawinan dini ini. Kebijakan penguatan aksesibilitas dan pemerataan pendidikan bagi anak menjadi hal yang sangat perlu untuk terus didorong. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022 dalam artikel indonesiabaik.id (2022), sebanyak 33,76% pemuda di Indonesia tercatat menikah pertama kali pada usia 19–21 tahun. Sementara itu, 27,07% di antaranya memulai pernikahan di usia 22–24 tahun, dan 19,24% lainnya menikah untuk pertama kalinya saat berusia 16–18 tahun (Badan Pusat Statistik, 2022).

Keluarga pasangan muda yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah pasangan yang telah menikah secara sah menurut agama dan negara dengan usia pernikahan kurang dari atau tujuh tahun. Rentang waktu tersebut dipilih karena merupakan fase awal pembentukan kehidupan berkeluarga, ketika pasangan masih beradaptasi terhadap berbagai perubahan peran, tanggung jawab, serta proses membangun pola komunikasi dan kepemimpinan dalam keluarga. Pernikahan

sendiri merupakan ikatan yang sah antara laki-laki dan perempuan yang diakui oleh agama dan negara serta diselenggarakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia (Fitri, 2024).

Dalam kajian mengenai stabilitas pernikahan, dikenal istilah *seven-year itch*, yaitu fenomena yang menggambarkan meningkatnya kerentanan konflik atau perceraian pada tahun-tahun awal pernikahan. Istilah ini muncul karena berbagai penelitian menemukan bahwa risiko perceraian cenderung mencapai puncaknya sekitar tahun ketujuh usia pernikahan. Namun sebuah penelitian lain menegaskan bahwa fenomena tersebut bukan merupakan tahapan alami yang pasti dialami setiap pasangan, melainkan pola statistik yang muncul akibat perbedaan karakteristik dan tingkat kerentanan setiap pasangan terhadap perceraian (Xu, 2016). Oleh karena itu, tujuh tahun pertama pernikahan tetap dipandang sebagai periode penting untuk memahami bagaimana pasangan membangun relasi, melakukan penyesuaian peran, serta mengonstruksi pola kepemimpinan dalam keluarga. Dengan demikian, pemilihan pasangan dengan usia pernikahan di bawah tujuh tahun dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa fase tersebut merupakan masa yang krusial dalam proses pembentukan dinamika kehidupan keluarga.

Pada kajian lain juga dijelaskan bahwa risiko perceraian tidak bersifat statis, melainkan cenderung meningkat pada fase awal perkawinan, mencapai titik tertentu, lalu menurun kembali, sehingga masa awal pernikahan dapat dipahami sebagai periode yang rawan dalam dinamika rumah tangga. Namun, fenomena ini tidak dapat dimaknai sebagai tahapan yang pasti dialami oleh semua pasangan, melainkan lebih sebagai pola statistik yang dipengaruhi oleh karakteristik pasangan, kualitas relasi, serta kemampuan mereka dalam beradaptasi terhadap peran-peran baru dalam rumah tangga. Dengan demikian, rentang 1–7 tahun pertama pernikahan menjadi periode yang penting untuk dikaji karena pada fase ini pasangan masih membangun pola komunikasi, pembagian peran, penyelesaian konflik, dan penyesuaian emosional yang sangat menentukan keberlangsungan hubungan (Kulu, 2014).

Terdapat tiga penyebab utama perceraian yang terjadi di Surabaya. Penyebab yang paling dominan adalah perselisihan yang terjadi secara terus – menerus antara pasangan, yang tercatat sebanyak 16.489 kasus selama lima tahun. Faktor yang

kedua adalah faktor ekonomi dengan total sebanyak 9.126 kasus yang menunjukkan bahwa permasalahan keuangan rumah tangga memiliki peran signifikan dalam mendorong perceraian. Ketiga, sebanyak 1.309 kasus perceraian disebabkan oleh salah satu pihak yang meninggalkan pasangannya, sehingga menciptakan ketidakseimbangan peran dalam rumah tangga (Chasanah, 2023). Temuan ini menunjukkan bahwa konflik yang berlarut-larut dan ketidakseimbangan peran dalam rumah tangga dapat menjadi indikator lemahnya manajemen hubungan dan pengambilan keputusan di dalam keluarga. Dalam konteks pasangan muda di Surabaya, hal ini membuka ruang untuk meneliti bagaimana gaya kepemimpinan dalam rumah tangga memengaruhi dinamika relasi suami-istri, penyelesaian konflik, serta pembagian peran dan tanggung jawab.

Pernikahan menyatukan dua manusia dengan gender yang berbeda dan menjadi bagian dari struktur masyarakat yang memiliki fungsi tertentu, seperti reproduksi, sosialisasi anak, dan stabilitas sosial. Pernikahan menjadi dasar pembentukan unit sosial terkecil, yaitu keluarga. Dalam keluarga, terdapat struktur yang mengatur peran dan tanggung jawab masing-masing pasangan dalam menjalani kehidupan bersama. Struktur ini berfungsi menjaga stabilitas keluarga sebagai unit sosial dasar dalam masyarakat. Pembagian peran antara suami dan istri, baik dalam hal ekonomi, pengasuhan anak, hingga pengambilan keputusan, dibentuk oleh norma budaya dan nilai-nilai sosial yang berlaku. Dengan adanya struktur yang jelas, diharapkan setiap individu dalam keluarga dapat menjalankan fungsinya secara seimbang sehingga tercipta keharmonisan dan ketahanan keluarga.

Dalam ilmu sosiologi, secara garis besar ada lima perspektif yang bisa digunakan untuk menganalisis keluarga (Awaru, 2021). Kelima perspektif ini berbeda dalam melihat keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat, adapun perspektif tersebut yang pertama adalah keluarga dalam perspektif fungsionalisme, berarti keluarga berperan dalam mempertahankan keseimbangan sosial dan mendukung kesejahteraan setiap individu. Perspektif kedua ialah keluarga di dalam perspektif konflik, dalam perspektif ini keluarga dalam sistem ekonomi kapitalis menyerupai struktur pabrik yang Dimana istri berada di bawah dominasi suami, seperti pekerja di bawah kapitalis, dan konflik kelas dalam keluarga dapat memicu pertengkaran, perceraian, dan ketidakharmonisan. Keluarga dalam perspektif

selanjutnya yakni perspektif interaksionisme simbolik, keluarga dipahami sebagai lembaga tempat individu menjalani, menyesuaikan, dan mengadaptasi peran sesuai harapan, dengan fokus pada cara berkomunikasi dan memahami interaksi antaranggota. Yang ke empat adalah keluarga dalam perspektif feminisme, menggambarkan ketidakadilan dalam keluarga muncul dari sistem patriarki dan kelas sosial dominasi laki-laki atas perempuan telah terjadi sejak sebelum kapitalisme, di mana pria mendapat hak istimewa karena perannya sebagai pencari nafkah. Yang terakhir keluarga dalam perspektif postmodernisme artinya, keluarga memiliki kemampuan untuk menyebarkan, menyesuaikan, atau mengubah aturan sebagai satu kesatuan yang memiliki tujuan utama. Kesantunan menjadi ciri khas keluarga postmodern serta batas antara ranah publik dan privat menjadi lebih terbuka dan lentur.

Lima perspektif yang dikemukakan oleh Awaru memberikan landasan teoritis yang memperkuat pemahaman terhadap dinamika kepemimpinan dalam keluarga pasangan muda. Perspektif tersebut menunjukkan bahwa struktur, peran, dan relasi dalam keluarga bersifat dinamis, kontekstual, dan sarat makna sosial, yang sangat relevan dengan pendekatan Max Weber dalam memahami bentuk-bentuk kepemimpinan. Khususnya, perspektif interaksionisme simbolik dan postmodernisme menguatkan bahwa pasangan muda saat ini cenderung membentuk pola kepemimpinan yang fleksibel, egaliter, dan rasional berdasarkan komunikasi dan kesepakatan bersama, bukan sekadar norma tradisional atau hierarki gender (Awaru, 2021). Hal ini sejalan dengan tujuan penelitian untuk mengidentifikasi model kepemimpinan rumah tangga pasangan muda di Surabaya yang mulai bergeser dari pola otoriter menuju model kepemimpinan legal-rasional dan partisipatif.

Dalam struktur keluarga tradisional, suami cenderung lebih dominan sebagai kepala keluarga, dan keputusannya harus dihormati serta diikuti. Dominasi ini membuat sebagian suami merasa memiliki kedudukan lebih tinggi daripada pasangannya, sehingga berpotensi bersikap sewenang-wenang dan memicu ketidakharmonisan dalam keluarga. Kepemimpinan seperti ini tergolong dalam model kepemimpinan otoriter, pemimpin otoriter tidak meminta atau menerima saran atau inisiatif dari bawahan (Prayudi, 2022). Pada konteks manajemen otoriter

telah berhasil karena memberikan motivasi yang kuat kepada manajer. Ini memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat, karena hanya satu orang yang memutuskan untuk seluruh kelompok dan menyimpan setiap keputusan untuk dirinya sendiri sampai dia merasa perlu untuk dibagikan dengan anggota kelompok lainnya. Situasi ini tidak terlepas dari kuatnya budaya patriarki yang mengakar dalam masyarakat.

Budaya patriarki merupakan suatu sistem sosial di mana laki-laki memegang peran utama dalam hal otoritas, kekuasaan, dan kendali, terutama dalam lingkungan keluarga (Syahrizan, 2024). Hal ini juga tercermin dalam masyarakat Indonesia tradisional yang di mana laki-laki diposisikan sebagai pihak yang berkuasa, sementara perempuan dianggap sebagai golongan kelas dua yang harus patuh dan tunduk kepada laki-laki (Halizah, 2023). Model kepemimpinan seperti ini banyak diterapkan dalam keluarga-keluarga pada masa lampau. Model kepemimpinan patriarki yang banyak dianut oleh pasangan pada masa lalu sering kali didukung oleh norma sosial dan nilai-nilai budaya yang mengidealkan peran laki-laki sebagai pemimpin dan pencari nafkah utama, sementara perempuan diharapkan untuk berfokus pada urusan domestik serta pengasuhan anak. Pola ini membentuk struktur relasi yang hierarkis dalam keluarga, di mana otoritas suami tidak hanya diakui, tetapi juga dianggap sebagai hal yang wajar dan tidak perlu dipertanyakan.

Dalam konteks tersebut, perempuan mengalami pembatasan dalam mengekspresikan pendapat, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, bahkan dalam hal-hal yang secara langsung berdampak pada kehidupan mereka. Praktik budaya patriarki ini masih mengakar dalam bentuk diskriminasi. Ketidaksetaraan antara peran laki-laki dan perempuan menciptakan hambatan struktural yang menghalangi individu dalam masyarakat untuk mendapatkan akses yang setara. Akibatnya, hubungan yang seharusnya bersifat setara dan saling mendukung menjadi terganggu oleh dominasi salah satu pihak, karena ketidakseimbangan peran dan otoritas yang terjadi (Trisnawati, 2023).

Usia yang direkomendasikan untuk memasuki jenjang pernikahan adalah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki, mengingat pada rentang usia tersebut individu umumnya telah mencapai tingkat kematangan fisik, emosional, dan psikologis yang cukup untuk membangun kehidupan berumah tangga

(Askandar, 2023). Sejalan dengan penelitian lain, diperlukan kesiapan dari kedua belah pihak, baik secara mental maupun material, dikarenakan pada kondisi tersebut pasangan muda dapat mengatur bagaimana struktur dan model kepemimpinan keluarga yang akan digunakan (Jayadi, 2021). Kesiapan ini menjadi fondasi penting dalam menciptakan hubungan rumah tangga yang sehat, saling menghargai, dan mampu menghadapi tantangan bersama. Tanpa adanya kesiapan tersebut, pasangan rentan menghadapi konflik peran, ketidakseimbangan dalam pengambilan keputusan, serta kesulitan dalam memenuhi tanggung jawab keluarga secara optimal.

Dilansir dari sebuah artikel, model kepemimpinan dalam keluarga pasangan muda Generasi Z di Indonesia menunjukkan pergeseran signifikan dari pola tradisional menuju pendekatan yang lebih egaliter, kolaboratif, dan adaptif terhadap dinamika sosial modern (IDN Times Sumut, 2023). Perubahan gaya kepemimpinan yang terjadi pada kalangan pasangan muda yang baru menikah di era modern ini membuat peran gender dalam rumah tangga lebih fleksibel. Pasangan muda hidup di era modern yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan perubahan sosial yang cepat, maka dari itu akan berpengaruh pada keputusan pasangan muda dalam memilih model kepemimpinan pada rumah tangga mereka (Intan, 2023). Model kepemimpinan pada pasangan muda saat ini cenderung berbeda dengan generasi - generasi sebelumnya. Jika sebelumnya kepemimpinan dalam keluarga cenderung bersifat hierarkis dengan suami sebagai pemimpin utama, kini banyak pasangan muda yang menerapkan pola kepemimpinan yang lebih fleksibel dan egaliter.

Pasangan muda saat ini cenderung mengadopsi gaya kepemimpinan yang lebih kolaboratif, adaptif, dan berbasis pada komunikasi yang terbuka (Hendarsyah, 2024). Gaya kepemimpinan semacam ini dirasa sejalan dengan karakteristik pasangan muda di Surabaya yang dipengaruhi oleh dinamika kehidupan perkotaan, budaya lokal, serta perubahan sosial dan ekonomi. Surabaya, sebagai kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia, memiliki karakteristik sosial yang khas karena masyarakatnya banyak berasal dari latar belakang urbanisasi. Kondisi ini turut memengaruhi pola kepemimpinan dalam keluarga pasangan muda. Seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya partisipasi perempuan dalam

dunia kerja, kepemimpinan dalam keluarga pun bergeser ke arah yang lebih egaliter, terutama pada pasangan muda yang memiliki tingkat pendidikan tinggi.

Salah satu model kepemimpinan yang dapat diterapkan dalam rumah tangga adalah kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis terdiri dari pemimpin yang berbagi kemampuan pengambilan keputusan dengan anggota kelompok dengan mempromosikan kepentingan anggota kelompok dan dengan mempraktikkan kesetaraan sosial (Prayudi, 2022). Ini juga disebut kepemimpinan bersama, model ini ditandai dengan keterlibatan seluruh anggota keluarga dalam proses pengambilan keputusan. Model kepemimpinan ini mendorong komunikasi yang terbuka dan penghargaan terhadap pendapat setiap anggota keluarga, sehingga menciptakan suasana harmonis dan saling menghargai.

Pemimpin dalam keluarga yang menerapkan gaya demokratis mendorong partisipasi, diskusi, serta kolaborasi antara semua anggota keluarga. Setiap individu diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat dan ide, sehingga keputusan yang diambil merupakan hasil kesepakatan bersama yang menguntungkan seluruh anggota keluarga. Kepemimpinan demokratis merupakan pendekatan yang menekankan partisipasi aktif, pengambilan keputusan secara kolektif, dan keterlibatan seluruh anggota tim dalam proses pengambilan keputusan (Rachmadhani, 2023). Dalam konteks keluarga, gaya kepemimpinan ini terlihat ketika suami dan istri berdiskusi dan mengambil keputusan bersama dalam berbagai aspek kehidupan. Ketika pasangan telah memiliki anak, orang tua juga melibatkan anak dalam diskusi, disesuaikan dengan usia dan tingkat kematangan anak. Gaya kepemimpinan ini dinilai relevan dan sesuai dengan dinamika kehidupan keluarga pada era modern saat ini.

Gaya kepemimpinan liberal juga dinilai sesuai bagi pasangan muda di era saat ini. Gaya kepemimpinan liberal dalam rumah tangga mengacu pada pendekatan di mana salah satu atau kedua pasangan memberikan kebebasan yang luas kepada anggota keluarga untuk membuat keputusan sendiri dan mengatur kehidupan sehari-hari mereka. Rumah tangga yang menerapkan gaya ini, pemimpin cenderung bersikap pasif dan jarang memberikan arahan atau pengawasan yang ketat. Namun, kebebasan dalam pengambilan keputusan tidak berarti tanpa batas atau tanpa aturan. Konsep liberasi yang menjadi bagian dari ideologi demokrasi diartikan

sebagai suatu bentuk kebebasan yang disertai tanggung jawab, yakni kebebasan dalam kerangka aturan yang jelas sehingga pihak yang kuat tidak menindas pihak yang lemah (Zulhidayat, 2024). Jika diinterpretasikan dalam konteks rumah tangga, gaya kepemimpinan liberal berarti bahwa kebebasan yang diberikan kepada pasangan suami istri tetap berada dalam batasan nilai dan aturan yang mengikat. Dengan demikian, tidak ada satu pihak pun yang berhak mendominasi atau menindas pihak lainnya dalam relasi keluarga.

Semakin beragamnya nilai, peran gender, serta ekspektasi dalam rumah tangga, pasangan muda di kota besar seperti Surabaya mulai membentuk model kepemimpinan keluarga yang berbeda dari pola tradisional yang cenderung hierarkis. Salah satu bentuk yang berkembang adalah model kepemimpinan liberal, yang menekankan pada kesetaraan, kolaborasi, dan fleksibilitas peran antara suami dan istri. Model ini tidak terbentuk begitu saja, melainkan merupakan hasil dari proses konstruksi sosial melalui interaksi, negosiasi makna, dan pengalaman sehari-hari pasangan. Oleh karena itu, penting untuk meneliti bagaimana pasangan muda membentuk dan memaknai kepemimpinan dalam keluarga mereka, agar dapat memahami dinamika rumah tangga modern secara lebih komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap model kepemimpinan yang dibangun oleh pasangan muda di Surabaya serta faktor-faktor sosial yang memengaruhinya.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana fenomena pernikahan muda di Surabaya?
2. Bagaimana model kepemimpinan yang ada dalam keluarga pasangan muda di Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan fenomena pernikahan muda yang terjadi di kota Surabaya.
2. Untuk menganalisis model kepemimpinan yang diterapkan dalam keluarga pasangan muda di Surabaya, serta bagaimana model tersebut memengaruhi dinamika relasi antara suami dan istri.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

1. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian sosiologi keluarga, khususnya dalam memahami dinamika kepemimpinan dalam rumah tangga pasangan muda di era modern.
2. Memperluas penerapan teori kepemimpinan Max Weber dalam studi tentang relasi domestik, khususnya dalam pembentukan peran dan otoritas dalam keluarga.
3. Menjadi dasar bagi penelitian lanjutan terkait pergeseran nilai-nilai kepemimpinan dan peran gender dalam institusi keluarga urban.

Manfaat Praktis

1. Menjadi referensi bagi pasangan muda dalam membangun relasi rumah tangga yang setara dan komunikatif berdasarkan pemahaman bersama tentang kepemimpinan.
2. Memberikan masukan bagi lembaga penyuluhan keluarga atau konselor pernikahan dalam merancang program yang mendorong pola kepemimpinan egaliter dalam rumah tangga.
3. Menjadi pertimbangan awal bagi pembuat kebijakan atau praktisi sosial dalam merumuskan kebijakan keluarga yang responsif terhadap perubahan nilai dan struktur dalam masyarakat urban